

Tabel 4.1

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Renstra PD

Meningkatnya Ketahanan pangan, energi dan air	Meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air dan penanggulangan bencana melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan				1. Kapasitas air baku m ³ /detik 2. Indeks Ketahanan Air Provinsi		
		Meningkatnya Aspek Pendayagunaan Sumber Daya Air			1. Rasio/Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi 2. Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas Kabupaten/Kota (Cross Cutting)		
			Optimalnya Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Air Baku		1. Luas Daerah Irigasi (DI) Provinsi yang dibangun atau direhabilitasi 2. Luas Daerah Irigasi Rawa (DIR) Provinsi yang dibangun atau direhabilitasi 3. Debit air baku yang dihasilkan (liter/detik)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Terbangunnya dan/atau terehabilitasinya jaringan irigasi pada Daerah Irigasi (DI) tingkat provinsi, tersedianya sarana air baku untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air	Indeks Luas Daerah Irigasi tingkat provinsi yang dibangun dan/atau direhabilitasi	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
				Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
			Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas Sistem Pengelolaan Irigasi		1. Luas Daerah Irigasi (DI) Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan (OP) 2. Luas Daerah Irigasi (DIR) Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan (OP)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya luas Daerah Irigasi (DI) dan Daerah Irigasi Rawa (DIR) kewenangan Provinsi yang dilakukan Operasional dan Pemeliharaan (OP) secara berkelanjutan	Indeks Luas Daerah Irigasi tingkat provinsi yang dioperasikan dan dipelihara	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	
			Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi		1. Persentase Komisi Irigasi Kab/Kota yang Aktif 2. Persentase kelompok petani pemakai air (P3A) yang aktif	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Irigasi	Indeks Persentase Komisi Irigasi Kab/Kota yang Aktif dan kelompok petani pemakai air (P3A) yang aktif	KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA 1000 Ha - 3000 Ha DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Kelembagaan Pengelola Irigasi yang mendapatkan Operasionalisasi (KOMIR)	Jumlah Unit Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	

Meningkatnya upaya penanggulangan bencana		Meningkatnya Upaya Penanggulangan Bencana			1. Persentase Daerah Rawan Bencana Banjir dan Longsor yang Memiliki Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Banjir dan Longsor 2. Persentase Kawasan Beresiko Bencana Banjir dan Longsor yang Tersedia sarana Kesiapsiagaan Bencana		
			Meningkatnya ketersediaan Prasarana Kesiapsiagaan Banjir dan longsor		Persentase Jenis Prasarana Banjir dan longsor yang tersedia	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Tersedianya prasarana kesiapsiagaan banjir dan longsor sesuai standar teknis untuk mendukung upaya mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana di wilayah rawan	Indeks prasarana kesiapsiagaan banjir dan longsor yang dibangun atau direhabilitasi di wilayah rawan bencana	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Normalisasi / Restorasi Sungai	
				Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Pembangunan Polder / Kolam Retensi	
				Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Peningkatan Polder / Kolam Retensi	
				Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Terehabilitasinya Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
				Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
				Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	
				Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	
			Meningkatnya ketersediaan Sarana Kesiapsiagaan Banjir dan longsor		Persentase Jenis Sarana Banjir dan longsor yang tersedia	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Tersedianya sarana kesiapsiagaan banjir dan longsor untuk mendukung respon cepat dan efektif terhadap potensi bencana	Indeks sarana kesiapsiagaan banjir dan longsor yang disediakan di wilayah rawan bencana	KEGIATAN PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi (DEWAN SDA)	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	
				Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	
				Terkelolanya Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	
				Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar dan Pengaman Pantai yang Disusun	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendalian Banjir, Lahar,	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Operasional dan Pemeliharaan Sungai	
				Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	

		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah		Persentase Dokumen PEP yang tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terintegrasi, konsisten, berbasis data, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	1. Persentase keterpaduan dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah 2. Persentase perangkat daerah yang menyusun dokumen perencanaan kinerja (Renja dan PK) secara tepat waktu dan sesuai pedoman 3. Jumlah laporan evaluasi kinerja pembangunan daerah yang disusun sesuai siklus dan standar 4. Persentase program/kegiatan prioritas yang dievaluasi secara berkala 5. Tingkat kepatuhan perangkat daerah terhadap sistem evaluasi dan pelaporan berbasis kinerja	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1. Persentase realisasi belanja perangkat daerah terhadap anggaran yang tersedia 2. Persentase laporan pertanggungjawaban keuangan yang disusun tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintahan 3. Jumlah perangkat daerah yang menyusun dan menyampaikan dokumen penatausahaan keuangan sesuai jadwal 4. Persentase transaksi keuangan perangkat daerah yang dilakukan secara non-tunai 5. Persentase perangkat daerah yang bebas temuan administrasi keuangan dari hasil pemeriksaan	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tertib, akurat, akuntabel, dan mendukung manajemen ASN berbasis sistem merit	1. Persentase data kepegawaian perangkat daerah yang mutakhir dan terintegrasi dalam sistem informasi kepegawaian nasional (SAPK/BKN) 2. Persentase proses administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (pengangkatan, kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, cuti, dll.) 3. Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun sesuai ketentuan (SK, DP3, SKP, PAK, dll.) 4. Persentase perangkat daerah yang melaksanakan penilaian kinerja ASN (SKP dan perilaku kerja) secara tepat waktu 5. Persentase ASN yang datanya tervalidasi secara digital dan terdokumentasi dalam sistem kepegawaian internal	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

			Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum untuk mendukung efektivitas kinerja perangkat daerah		Persentase layanan administrasi umum yang diselesaikan tepat waktu sesuai standar pelayanan yang ditetapkan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terselenggaranya administrasi umum perangkat daerah yang tertib, efisien, terdokumentasi dengan baik, dan mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Persentase surat masuk dan keluar yang terdokumentasi secara tertib dan digital 2. Jumlah unit kerja yang menerapkan sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik (e-office) 3. Jumlah dokumen administrasi umum yang disusun dan terdokumentasi sesuai standar (ND, SK, laporan, notulensi, dll.) 4. Persentase realisasi pengelolaan kebutuhan rumah tangga kantor dan layanan umum lainnya secara tepat waktu	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan komponen instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola Barang Milik Daerah Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola Barang Milik Daerah Terlaksana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya barang milik daerah secara tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat waktu untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1. Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan dan jadwal pelaksanaan 2. Persentase barang milik daerah yang diadakan sesuai spesifikasi teknis dan standar kualitas 3. Jumlah barang milik daerah yang tercatat dalam sistem penatausahaan (SIMDA BMD/SIPD/BMD lainnya) 4. Persentase OPD yang menerima barang sesuai kebutuhan rencana pengadaan 5. Persentase pengadaan yang dilakukan melalui e-purchasing, e-catalog, atau sistem pengadaan elektronik	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Pengadaan Alat Besar	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang yang efisien dan akuntabel dalam mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan prosedur (akuntabel)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya jasa penunjang secara tepat mutu, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah	1. Persentase penyediaan jasa penunjang yang terlaksana sesuai jadwal dan kebutuhan perangkat daerah 2. Jumlah jenis jasa penunjang yang disediakan sesuai perencanaan tahunan (misal: keamanan, kebersihan, konsumsi, transportasi, dll.) 3. Persentase kontrak jasa penunjang yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Persentase penyedia jasa penunjang yang memiliki kualifikasi sesuai standar (berbadan hukum, bersertifikat, dll.)	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah yang terawat dan fungsional sebagai penunjang operasional perangkat daerah		Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan siap digunakan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah secara berkala, tepat waktu, dan sesuai standar untuk menjamin kelaikan fungsi dalam mendukung urusan pemerintahan daerah	1. Jumlah barang milik daerah yang dipelihara sesuai dengan jadwal dan standar operasional 2. Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik dan fungsional 3. Persentase realisasi rencana pemeliharaan barang milik daerah yang dilaksanakan 4. Persentase pemeliharaan yang terdokumentasi dalam sistem penatausahaan BMD (SIMDA BMD/SIPD/BMD daerah)	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	